



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KONTINJENSI PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2016, telah diatur mengenai Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir Tahun 2016;
- b. bahwa dalam rangka antisipasi, mobilisasi dan koordinasi sumber daya dalam keadaan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan transisi ke pemulihan bencana banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2017 diperlukan perencanaan Kontinjensi penanggulangan bencana, sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian karena sudah tidak relevan dengan perkembangan dan situasi kebencanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KONTINJENSI PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR TAHUN 2017.

Pasal 1

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir tahun 2017 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana banjir.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. mengidentifikasi beberapa daerah risiko bencana banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. menetapkan strategi dan kebijakan penanggulangan bencana banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. mensinergikan peran pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. menetapkan skala prioritas penanggulangan bencana banjir bagi 25 (dua puluh lima) Kelurahan rawan bencana banjir; dan
- e. menetapkan rencana operasi penanggulangan bencana banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3

(1) sistematika Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Tahun 2017 meliputi :

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Penetapan dan Pengembangan Skenario
- BAB III Tujuan, Kebijakan dan Strategi
- BAB IV Perencanaan Klaster
- BAB V Rencana Tindak Lanjut
- BAB VI Penutup
- Lampiran-lampiran

(2) Rincian Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2017

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 22006

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 15 TAHUN 2017
Tanggal 7 Februari 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dokumen "Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2017" telah selesai disusun bersama-sama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD), Lembaga Non Pemerintah, Forum PRB Provinsi DKI Jakarta.

Dokumen ini merupakan panduan para pemangku kepentingan Provinsi DKI Jakarta dalam menetapkan Rencana Operasi pada fase Kesiapsiagaan, tanggap darurat dan Transisi ke Pemulihan banjir Tahun 2017 sehingga dapat mengurangi korban dan kerugian yang tidak kita harapkan bersama.

Pemerintah Provinsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta aktif dalam menyusun Dokumen Rencana Kontinjensi Banjir 2017.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kontinjensi ini masih terdapat kekurangan, dikarenakan keterbatasan standar data dan waktu maka diperlukan saran dan kritikan dari pembaca. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak dan terima kasih.

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Dasar Hukum	3
C. Gambaran Umum Wilayah	4
D. Potensi Kejadian Banjir di Jakarta	5
BAB II. PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN SKENARIO	6
A. Penetapan Skenario	6
B. Pengembangan Skenario	6
BAB III. TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI	16
A. Tujuan	16
B. Kebijakan	16
C. Strategi.....	17
BAB IV. PERENCANAAN KLASTER	19
1. Klaster Pencarian dan Penyelamatan	19
2. Klaster Pengungsian dan Perlindungan	21
3. Klaster Kesehatan.....	23
4. Klaster Logistik	26
5. Klaster Sarana dan Prasarana.....	28
6. Klaster Pendidikan	30
7. Klaster Peran Serta Masyarakat	32
BAB V. RENCANA TINDAK LANJUT	34
BAB VI. PENUTUP	35
Lampiran - Lampiran.....	36

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibu Kota Republik Indonesia yang memiliki permasalahan kebencanaan yang kompleks. Berdasarkan analisis risiko bencana yang dilakukan oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta salah satu ancaman bencana yang dihadapi oleh warga Jakarta adalah Banjir¹. Dengan luas wilayah sebesar 661,52 km², 40% atau 24.000 Ha merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata di bawah permukaan air laut. Provinsi DKI Jakarta juga merupakan pertemuan sungai dari bagian Selatan dengan kemiringan dan curah hujan tinggi. Terdapat 13 sungai yang melewati dan bermuara ke Teluk Jakarta. Secara alamiah, kondisi ini memposisikan wilayah Provinsi DKI Jakarta memiliki kerawanan yang tinggi terhadap banjir.

Berdasarkan kondisi tersebut maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya dengan menyusun perencanaan dan kebijakan dalam melaksanakan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, salah satunya adalah Perencanaan Kontinjensi Banjir Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) PP. 21/2008 dilakukan pada kondisi kesiapsiagaan.

Rencana ini diharapkan dapat menjadi Pedoman pada saat menghadapi darurat bencana bagi semua pelaku penanggulangan bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta sehingga semua sumber daya yang ada dapat termobilisasi dan terkordinasi dengan baik untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana. Dalam hal bencana terjadi, maka Rencana Kontinjensi berubah menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat atau Rencana Operasi.

B. Dasar Hukum

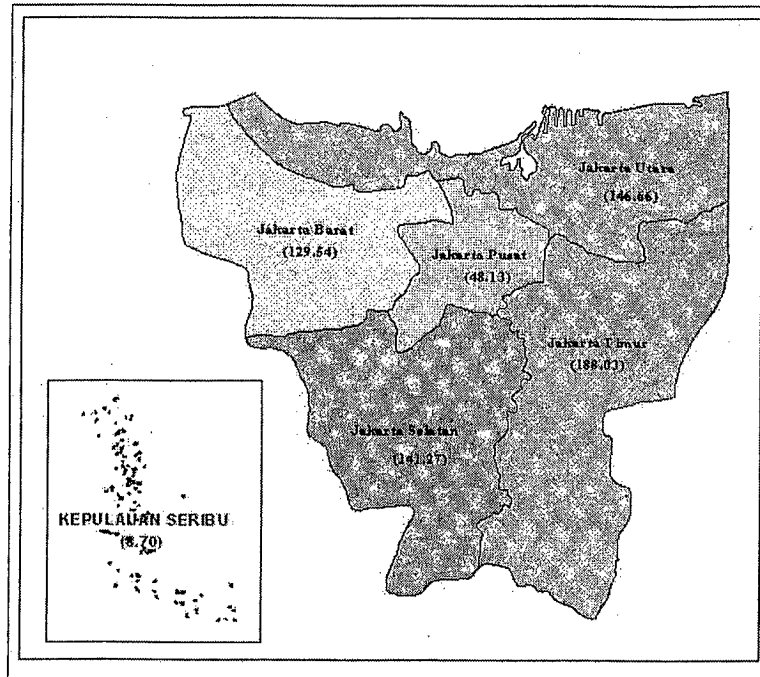
1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah No 21 Th. 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembagian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Tanggap Darurat;
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 250 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta 2015-2019.
8. Instruksi Gubernur Nomor 153 Tahun 2016 Tentang Kesiapsiagaan dan Pengendalian Potensi Ancaman Genangan, Angin Puting Beliung dan Demam Berdarah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

¹ Rencana Penanggulangan Bencana 2013-2017. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

C. Gambaran Umum Wilayah

Provinsi DKI Jakarta berada pada posisi geografis antara 106.22'42" dan 106.58'18" Bujur Timur, serta antara 5.19'12" dan 6.23'54" Lintang Selatan dengan keseluruhan luas wilayah 7.659,02 km², meliputi 662,33 km² daratan, termasuk 110 pulau di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan 6.977,5 km² lautan.

Tabel 1.1. Luas Wilayah dan Administrasi Kewilayahan Provinsi DKI Jakarta



Sumber : Jakarta Dalam Angka 2016

C.1. Kependudukan

Jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2015 berdasarkan proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 sebesar 10.177.924 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 1,02 persen. Kepadatan penduduk DKI Jakarta tahun 2015 adalah 15.366,87 jiwa setiap 1 km². Kota Jakarta Barat memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 19.017,92 jiwa/km². Dalam konteks penanggulangan bencana, pertumbuhan penduduk tersebut dapat berpotensi meningkatkan risiko bencana.

Tabel 1.2, Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Kabupaten/Kota Regency/City	Jumlah Penduduk (ribu) Population (thousand)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2010	2014	2015	2010- 2015	2014- 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Kota Regency/City					
1. Kepulauan Seribu	21 414	23 011	23 340	1,74	1,43
2. Jakarta Selatan	2 071 628	2 164 070	2 185 711	1,08	1,00
3. Jakarta Timur	2 705 818	2 817 994	2 843 816	1,00	0,92
4. Jakarta Pusat	895 371	910 381	914 182	0,42	0,42
5. Jakarta Barat	2 292 997	2 430 410	2 463 560	1,45	1,36
6. Jakarta Utara	1 653 178	1 729 444	1 747 315	1,11	1,03
DKI Jakarta	9 640 406	10 075 310	10 177 924	1,09	1,02

Sumber/Source: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035/Indonesia Population Projection 2010–2035

C.2. Hidrologi

Secara hidrologis khususnya mengenai air permukaan, terdapat 13 sungai yang mengalir membelah Jakarta (*sebaran 13 sungai yang melintasi wilayah Provinsi DKI Jakarta terlampir*). Kondisi sungai ini cukup memprihatinkan dengan tingkat sedimentasi dan pengangkutan sampah tinggi. Akibatnya, jika hujan tinggi terjadi di hulu, permukaan air sungai dengan cepat meluap, yang pada gilirannya akan mengancam daerah rendah di Jakarta terutama daerah Jakarta Utara.

D. Potensi Kejadian Banjir di Jakarta

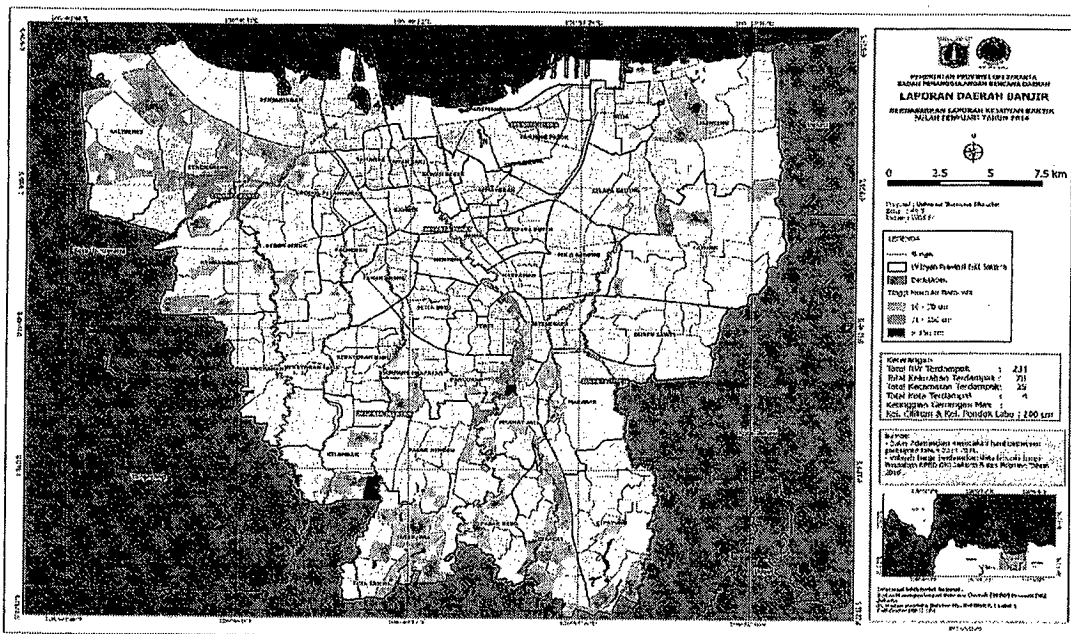
Potensi banjir di Jakarta dipengaruhi tiga aspek utama yaitu :

1. Banjir yang disebabkan oleh curah hujan lokal yang tinggi sehingga saluran drainase dan sungai meluap
2. Banjir kiriman yang disebabkan curah hujan tinggi di daerah hulu, yaitu Depok, Bogor, Puncak dan Cianjur sehingga sungai meluap.
3. Banjir yang disebabkan ROB (meningkatnya tinggi muka air laut) sehingga air tidak bisa terbuang kelaut terutama untuk kawasan di pantai utara DKI Jakarta diantaranya Kamal Muara, Pluit, Penjaringan, Kalibaru, Cilincing dan Marunda.

Sejarah banjir di Jakarta pada tahun 2007 sekitar 45% dari wilayah DKI Jakarta² dan menelan korban meninggal sebanyak 80 jiwa³ Banjir 2007 juga menimbulkan kerusakan dan kerugian terhadap aset terkena banjir yang melanda DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (JABODETABEK) diperkirakan senilai Rp. 5,16 triliun⁴. Sementara itu data dari BPBD Provinsi DKI Jakarta pada tahun

- 2013 banjir menggenangi 124 kelurahan 538 RW
- 2014 banjir menggenangi 125 kelurahan 634 RW
- 2015 banjir menggenangi 70 kelurahan 702 RW
- 2016 banjir menggenangi 57 Kelurahan 201 RW

Peta Sebaran Banjir Bulan Februari 2016



Sumber Peta Pusdalops BPBD Provinsi DKI Jakarta

² RPJMD DKI Jakarta 2013-2017

³ Laporan Kajian Banjir 2013 (BPBD DKI Jakarta, 2013)

⁴ BAPPENAS, Perkiraan kerusakan dan kerugian paska bencana banjir awal februari 2007 di wilayah JABODETABEK, 2007, hal. vii

BAB II

PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN SKENARIO

A. PENETAPAN SKENARIO

Salah satu hal terpenting dalam penyusunan rencana kontinjensi banjir tahun 2017 Provinsi DKI Jakarta, adalah perkiraan ancaman banjir masuk ke wilayah Provinsi DKI Jakarta. Disepakati perkiraan itu dianalisa berdasarkan :

1. Perkiraan curah hujan lokal wilayah DKI Jakarta
2. Perkiraan curah hujan wilayah Depok, Bogor, Puncak dan Cianjur
3. Perkiraan naiknya muka air laut (ROB)

Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan informasi dari Program Studi Meteorologi Institut Teknologi Bandung serta penghitungan kalender munculnya bulan penuh didapat data sebagai berikut :

1. Perkiraan curah hujan lokal di Provinsi DKI Jakarta mencapai puncaknya pada dasarian pertama dan kedua Februari 2017 dengan perkiraan curah hujan mencapai 100 – 200 mm/dasarian;
2. Perkiraan Curah hujan bagian hulu di wilayah Depok, Bogor, Puncak dan Cianjur mencapai puncaknya pada dasarian pertama bulan Februari 2017 dengan perkiraan curah hujan mencapai 100-200 mm/dasarian;
3. Perkiraan naiknya muka air laut yang terjadi pada saat bulan purnama, yaitu sekitar tanggal 11 s.d 12 Februari 2017.

Berdasarkan pada analisa potensi bencana banjir sebagaimana disebutkan diatas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 3 skenario perkiraan darurat banjir yaitu :

- 1. Skenario Tanggap Darurat diperkirakan pada tanggal 12 Februari 2017 dengan masa 7 (tujuh) hari 12 s.d 18 Februari 2017;**
- 2. Skenario Kesiapsiagaan ditetapkan H-10 sejak tanggal awal skenario tanggap darurat yaitu tanggal 2 s.d 11 Februari 2017;**
- 3. Skenario Transisi ke Pemulihan diperkirakan H+7 sejak tanggal akhir skenario tanggap darurat diperkirakan tanggal 19 s.d 25 Februari 2017**

Mengingat kondisi cuaca yang kerap berubah maka rencana kontinjensi ini dapat disesuaikan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi baik itu berupa waktu kejadian ataupun metode pelaksanaannya

B. PENGEMBANGAN SKENARIO

Perkiraan skenario yang dikembangkan dalam Rencana Kontinjensi ini adalah kejadian banjir Tahun 2017. Pengembangan skenario banjir pada rencana kontinjensi sebagai berikut :

B.1. Kondisi Kesiapsiagaan

B.1.1. Perkiraan Skenario Kejadian

Sesuai dengan analisa resiko bencana pada point A **ditetapkanlah Kesiapsiagaan selama 10 (sepuluh hari) pada tanggal 2 Februari s.d 11 Februari 2017.**

Curah hujan yang terjadi pada kondisi Kesiapsiagaan adalah 100 – 200 mm/dasarian, hal ini mengakibatkan ketinggian muka air di pos pantau Katulampa dan Depok (untuk sungai Ciliwung) serta pintu air yang masuk ke Jakarta mencapai (**siaga II**), pos-pos pantau ketinggian air di pintu air beberapa hulu sungai lainnya (Pintu air Karet mencapai **siaga I**, pintu air Manggarai **siaga I**, dan pintu air Sunter Hulu **siaga II**), serta ketinggian muka air laut di pos Pasar Ikan mencapai **200-250 cm.**

B.1.2. Skenario Dampak

Skenario dampak menjelaskan asumsi dampak terhadap aspek-aspek kehidupan akibat suatu bencana mempertimbangkan kerentanan dan kapasitas masyarakat yang terkena dampak bencana yang meliputi :

a) Aspek Kependudukan

Perkiraan Risiko Penduduk Wilayah Terdampak (Per Wilayah) pada saat Kesiapsiagaan tahun 2017 berdasarkan data BPBD Provinsi DKI Jakarta, hasil analisa data kejadian dari tahun 2013 sampai dengan 2016, sebagai berikut :

- 1) Sebaran banjir akan berdampak pada 16 Kecamatan, 25 Kelurahan dan 86 RW
- 2) Jumlah penduduk yang terdampak banjir : 327.005 Jiwa
- 3) Jumlah penduduk yang mengungsi : 9.810 Jiwa.
- 4) Penduduk yang terancam jiwa : 7 jiwa (rata-rata jumlah korban jiwa per 3 tahun terakhir)
- 5) Jumlah penduduk risiko tinggi : 491 Jiwa. (asumsi: 5% dari total pengungsi)
- 6) Jumlah penduduk yang sakit : 981 Jiwa. (asumsi: 10% dari total pengungsi)

b) Aspek Kewilayahan

Perkiraan Wilayah Terdampak (Per Wilayah) pada saat Kesiapsiagaan tahun 2017 berdasarkan data BPBD Provinsi DKI Jakarta, hasil analisa data kejadian dari tahun 2013 sampai dengan 2015, sebagai berikut :

NO	KECAMATAN		KELURAHAN	RW	Jumlah RW
1	JAKARTA BARAT				
1	CENKARENG	1	RAWA BUAYA	01, 02, 04, 011	4
2	KALI DERES	2	TEGAL ALUR	03, 04, 05, 09, 012	5
3	KEBON JERUK	3	KEDOYA SELATAN	005	1
		4	KEDOYA UTARA	02, 08	2
4	KEMBANGAN	5	KEMBANGAN UTARA	03, 04, 05, 010	4
	JAKARTA SELATAN				
1	KEBAYORAN BARU	1	CIPETE UTARA	02, 06, 07	3
		2	PETOGOGAN	002, 003	2
2	KEBAYORAN LAMA	3	CIPULIR	010	1
		4	PONDOK PINANG	005	1
3	PANCORAN	5	RAWAJATI	001, 007	2
4	PESANGGRAHAN	6	ULUJAMI	005	1
5	CILANDAK	7	PONDOK LABU	01, 03, 07, 09, 010	5
6	MAMPANG PRAPATAN	8	BANGKA	02, 03, 04	3
7	PASAR MINGGU	9	PEJATEN TIMUR	01, 03, 05, 06-010	8
		10	JATI PADANG	02-06, 08-010	8
	JAKARTA TIMUR				
1	JATINEGARA	1	BIDARA CINA	05, 07, 011, 014, 015	5
		2	KAMPUNG MELAYU	01-08	8

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	Jumlah RW		
	2	KRAMAT JATI	3	CAWANG	01, 02, 03, 05, 08, 012	6
			4	CILILITAN	06, 07	2
	3	MAKASAR	5	CIPINANG MELAYU	03, 04	2
			6	MAKASAR	05, 07	2
	4	CIRACAS	7	RAMBUTAN	02, 03, 06	3
JAKARTA UTARA						
	1	PADEMANGAN	1	PADEMANGAN BARAT	05	1
	2	PENJARINGAN	2	PLUIT	01, 05, 011, 016, 020, 021	6
			3	PENJARINGAN	017	1
JUMLAH TOTAL	17	Kecamatan	25	Kelurahan		86

Sumber: Hasil Rekapitulasi Data Laporan PUSDALOPS BPBD, Tahun 2015

c) Aspek Obyek Vital

Perkiraan Obyek Vital Terdampak pada saat Kesiapsiagaan tahun 2016 berdasarkan data BPBD Provinsi DKI Jakarta, hasil analisa data kejadian dari tahun 2013, sebagai berikut :

1. Jumlah Kantor Pemerintahan terdampak : 29 Unit;
2. Jumlah Puskesmas terdampak : 14 Unit;
3. Jumlah Rumah Sakit terdampak : 4 Unit;
4. Jumlah Sekolah terdampak : 128 Unit;
5. Jumlah Universitas terdampak : 6 Unit;
6. Jumlah Stasiun Kereta Api terdampak : 2 Unit;
7. Jumlah Gardu Listrik Tergenang : 7 Unit.

d) Aspek akses Transportasi

Berdasarkan data dari Polda Metro Jaya diperkirakan 25 jalur jalan terganggu akibat genangan banjir dengan ketinggian air mencapai 50 s.d 80 cm dengan lama genangan 2 s.d 4 jam, adapun rincian wilayah yang tergenang antara lain :

No	Wilayah	Lokasi Tergenang	Jumlah
1	Jakarta Barat	1. Citraland-Cengkareng, 2. Rawa Buaya 3. Jl. S. Parman, 4. Jl. Kyai Tapa,	4
2	Jakarta Utara	1. Tl. Podomoro, 2. Teluk Gong, 3. Sunter Jaya RT 06/09, 4. Cilincing KBN	4
3	Jakarta Timur	1. Jl. DI Panjaitan, 2. Jl. Swadaya Duren Sawit, 3. Dpn RS Duren Sawit, 4. Perintis Kemerdekaan, 5. Jl. Pinang Ranti	5
4	Jakarta Pusat	1. TL. Coca Cola (Cepu 13), 2. Kolong Lenmark (Dukuh Bawah), 3. Gn. Sahari, 4. Jl. Latuharhary, 5. Jl. Letjen Suprpto,	5

5	Jakarta Selatan	1. Jl. Raya Cileduk depan BNI, 2. Jl. Bank, 3. Kalibata-Dewi Sartika (Jmbtn Ciliwung), 4. Depan Tarakanita, 5. Deplu-Pesanggrahan, 6. Komplek POLRI pd. Karya, 7. Pd. Karya Jl. Bangka 9-11	7
Jumlah lokasi/kawasan yang tergenang			25

B.2. Kondisi Tanggap Darurat

B.2.1. Perkiraan Skenario Kejadian

Dengan semakin meningkatnya intensitas curah hujan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan wilayah hulu yaitu Bogor, Depok, Puncak dan Cianjur, menurut informasi BMKG dan Ahli dari ITB diperkirakan mencapai 280-400 mm/dasarian.

Berdasarkan analisa resiko bencana dimaksud maka **ditetapkanlah Kondisi Tanggap darurat selama 7 (tujuh hari) pada tanggal 12 Februari s.d 18 Februari 2017** dengan indikator :

1. Ketinggian muka air di pos pemantauan Katulampa dan Depok (untuk sungai Ciliwung) mencapai siaga I, pos pemantauan ketinggian air di beberapa pintu air hulu sungai lainnya meliputi Pintu air Karet, pintu air Manggarai, dan pintu air Sunter Hulu mencapai Siaga I
2. Ketinggian muka air laut di Pos Pasar Ikan yang mencapai >250 cm (siaga I)
3. Meningkatnya gangguan terhadap Akses jalan tergenang
4. Meningkatnya gangguan terhadap obyek vital

B.2.2. Skenario Dampak

Skenario dampak menjelaskan asumsi dampak terhadap aspek-aspek kehidupan akibat suatu bencana. Skenario dampak berfokus pada aspek-aspek terdampak yang harus segera dipulihkan dalam fase tanggap darurat. Pengembangan asumsi dampak mempertimbangkan kerentanan dan kapasitas masyarakat yang terkena dampak bencana seperti progress pekerjaan mitigasi struktural, pemahaman masyarakat akan risiko, kesiapsiagaan, dan ketersediaan sumberdaya dalam penanggulangan bencana. Aspek-aspek terdampak banjir meliputi :

a) Aspek Kependudukan

Perkiraan Risiko Penduduk Wilayah Terdampak (Per Wilayah) pada saat Tanggap Darurat tahun 2016 berdasarkan data BPBD Provinsi DKI Jakarta, hasil analisa data kejadian dari tahun 2013 sampai dengan 2015, sebagai berikut :

- 1) Sebaran banjir akan berdampak pada **22 kecamatan, 49 Kelurahan, 151 RW**
- 2) Jumlah penduduk di seluruh kelurahan terdampak banjir : **606.395 Jiwa.**
- 3) Jumlah penduduk yang mengungsi : **19.497 Jiwa** (asumsi: 3% dari total penduduk terdampak).
- 4) Penduduk yang terancam jiwa : **12 jiwa** (rata rata jumlah korban jiwa per 3 tahun terakhir)
- 5) Jumlah penduduk risiko tinggi : **975 Jiwa.** (asumsi: 5% dari total pengungsi)
- 6) Jumlah penduduk yang sakit : **1.950 Jiwa.** (asumsi: 10% dari total pengungsi)

b)Aspek Kewilayahan

Perkiraan Wilayah Terdampak (Per Wilayah) pada saat Tanggap Darurat tahun 2016 berdasarkan data BPBD Provinsi DKI Jakarta, hasil analisa data kejadian dari tahun 2013 sampai dengan 2015, sebagai berikut :

NO	WILAYAH					
	KECAMATAN		KELURAHAN	RW	JUMLAH RW	
1	JAKARTA BARAT					
	1	CENKARENG	1	CENKARENG BARAT	09, 10, 11, 14	4
			2	DURI KOSAMBI	04, 05, 06	3
			3	KAPUK	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15,16	14
			4	KEDAUNG KALI ANGKE	01, 04, 05, 08	4
			5	RAWA BUAYA	01, 02, 04, 11	4
	2	GROGOL PETAMBURAN	6	JELAMBAR	01, 04	2
			7	WIJAYA KESUMA	05	1
	3	KALI DERES	8	TEGAL ALUR	03, 04, 05, 09, 12	5
	4	KEBON JERUK	9	KEDOYA SELATAN	05	1
			10	KEDOYA UTARA	02, 08	2
	5	KEMBANGAN	11	KEMBANGAN UTARA	03, 04, 05, 10	4
2	JAKARTA SELATAN					
	1	KEBAYORAN BARU	1	CIPETE UTARA	02, 06, 07	3
			2	PETOGOGAN	02, 03	2
	2	KEBAYORAN LAMA	3	CIPULIR	10	1
			4	KEBAYORAN LAMA UTARA	11	1
			5	PONDOK PINANG	05	1
	3	PANCORAN	6	KALIBATA	05	1
			7	RAWAJATI	01, 07	2
	4	PESANGGRAHAN	8	ULUJAMI	05	1
	5	TEBET	9	BUKIT DURI	10, 11, 12	3
			10	MANGGARAI	04	1
	6	CILANDAK	11	PONDOK LABU	01, 03, 07, 09, 10	5
			12	CILANDAK TIMUR	01, 03	2
	7	MAMPANG PRAPATAN	13	BANGKA	02, 03, 04	3
			14	MAMPANG PRAPATAN	01, 04, 05, 06	4
			15	TEGAL PARANG	03, 04, 05	3
	8	PASAR MINGGU	16	PEJATEN TIMUR	01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10	8
			17	JATI PADANG	02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10	8
3	JAKARTA TIMUR					
	1	JATINEGARA	1	BIDARA CINA	05, 07, 011, 14, 15	5

			2	KAMPUNG MELAYU	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08	8
	2	KRAMAT JATI	3	CAWANG	01, 02, 03, 05, 08, 012	6
			4	CILILITAN	06, 07	2
			5	DUKUH	03, 04, 05, 06	4
	3	MAKASAR	6	CIPINANG MELAYU	03, 04	2
			7	HALIM PERDANA KUSUMA	05, 07, 08	3
			8	MAKASAR	05, 07	2
			9	RAMBUTAN	02, 03, 06	3
	4	CIRACAS	10	CIRACAS	03, 04, 05, 06, 08, 09	6
4	JAKARTA UTARA					
	1	CILINCING	1	MARUNDA	07	1
			2	SEMPER BARAT	03, 04	2
			3	SEMPER TIMUR	03	1
			4	SUKAPURA	02, 08, 010	3
	3	PADEMANGAN	5	PADEMANGAN BARAT	05	1
	4	PENJARINGAN	6	KAPUK MUARA	01	1
			7	PLUIT	01, 05, 011, 16, 20, 21	6
			8	PENJARINGAN	017	1
			9	TUGU SELATAN	03	1
			10	RAWA BADAK SELATAN	01, 02, 05	3
	5	TANJUNG PRIOK	11	WARAKAS	014	1
JUMLAH TOTAL	22	Kecamatan	49	Kelurahan		155

Sumber: Hasil Rekapitulasi Data Laporan PUSDALOPS BPBD, Tahun 2016

c) Aspek Obyek Vital

Perkiraan obyek vital terdampak pada saat Tanggap Darurat tahun 2016 berdasarkan data BPBD Provinsi DKI Jakarta, hasil analisa data kejadian dari tahun 2013, sebagai berikut :

1. Jumlah Kantor Pemerintahan terdampak : **88 Unit**;
2. Jumlah Puskesmas terdampak : **42 Unit**;
3. Jumlah Rumah Sakit dan Klinik terdampak : **12 Unit**;
4. Jumlah Sekolah terdampak : **388 Unit**;
5. Jumlah Universitas terdampak : **19 Unit**;
6. Jumlah Stasiun Kereta Api terdampak : **6 Unit**;
7. Jumlah Gardu Listrik Tergenang : **21 Unit**.

d) Aspek Akses Transportasi

Untuk kondisi tanggap darurat diperkirakan jalur jalan yang terganggu akibat genangan banjir 82 lokasi, dengan ketinggian air mencapai 50 s.d 100 cm dengan lama genangan diatas 4 jam, adapun rincian wilayah yang tergenang antara lain :

No	Wilayah	Lokasi Tergenang	Jumlah
1	Jakarta Barat	1. Jl. Daan Mogot, 2. Puri Kembangan,	13

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Depan Walikota Jakarta Barat, 4. Citraland-Cengkareng, 5. Kebun Jeruk- Tangerang, 6. Depan SAMSAT Barat, 7. Rawa Buaya, 8. Latumenten-Empang, 9. Jl. Asirok Sukabumi Selatan RT1/5 Kb. Jeruk, 10. Keluar Tol Puri Kembangan, 11. Jl. S. Parman, 12. Jl. Kyai Tapa, 13. Pos Pengumben 	
2	Jakarta Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tl. Podomoro, 2. Tl. Plumpang, 3. Jl. Perintis Kemerdekaan, 4. Jl. Kapuk Muara, 5. Cakung Priuk dpn KBN, 6. Kelapa Gading, 7. Teluk Gong, 8. Jl. Yos Sudarso, 9. Justus, 10. Gaya Motor, 11. Sunter Jaya RT 06/09; 12. Pegangsaan, 13. Jl. Hibrida, 14. Cilincing KBN 	14
3	Jakarta Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. DI Panjaitan, 2. Jl. Asem Baris, Kp. Melayu, 3. Tol Kolong Cawang/Terowongan Mina, 4. Jl. Otista Raya, 5. Underpass Cawang, 6. Cipinang Melayu, 7. Dari RS. Carolus-Matraman, 8. Jl. Swadaya Duren Sawit, 9. Dpn RS Duren Sawit, 10. Bidara Cina, 11. Perintis Kemerdekaan, 12. Jl. Kolonel Sugiono, 13. Jatinegara Barat, 14. Jl. Kebon Pala Halim, 15. Jl. Pinang Ranti 	15
4	Jakarta Pusat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lampu Merah Coca Cola (Cepu 13) 2. Gambir 3. RS. Carolus-Matraman 4. Kolong Landmark (Dukuh Bawah) 5. St. Tanah Abang –Jatibaru 6. Gn. Sahari, Pintu Besi depan Hotel Golden 7. Jl. Latuharhary 8. Jl. Biak 9. Depan Sarinah Lajur Kiri 10. Kampung Bencong 11. Rawa Sari 12. Jl. Letjen Suprpto 	17

		13. Petojo Selatan 14. Roxy 15. Kemayoran 16. Petamburan 17. Jl. Caringin	
5	Jakarta Selatan	1. Tl. Bangka, 2. Jl. Raya Cileduk dpn BNI, 3. Tl. Kostrad Tn. Kusir, 4. dpn Pom Bensin Pertanian, 5. Jl. Bank, 6. Kalibata-Dewi Sartika (Jmbtn Ciliwung), 7. Depan Htl Four Season, 8. Depan Tarakanita, 9. Kemang Bawah, 10. Abdul Majid, 11. Kemang Puri Sakti, 12. jl. Gatot Subroto dpn Pajak, 13. Kemang Selatan, 14. Deplu-Pesanggrahan, 15. Tl. Jeruk Purut, 16. Tl. Blok O, 17. Jl. Raya Pd Indah, 18. Komplek POLRI pd. Karya, 19. Jl. P. Antasari, 20. Pd. Pinang Timur 2, 21. Kemang Utara, 22. Pd. Karya Jl. Bangka 9-11, 23. Kalibata Jambui	23
Jumlah lokasi/kawasan yang tergenang			82

B.3. Perkiraan Kronologis Kejadian Transisi ke Pemulihan

B.3.1. Skenario Kejadian

- 1) Dengan berakhirnya masa tanggap darurat maka ditetapkan masa Transisi ke Pemulihan ke pemulihan selama 7 hari pada tanggal **19 s.d 25 Februari 2017**
- 2) Ketinggian muka air di pos pantau Katulampa dan Depok (untuk sungai Ciliwung) serta pintu air yang masuk ke Jakarta sudah mengalami penurunan mencapai **siaga III**, pos-pos pemantauan ketinggian air di pintu air beberapa hulu sungai lainnya (Pintu air Karet mencapai **siaga I**, pintu air Manggarai **siaga I**, dan pintu air Sunter Hulu **siaga II**)
- 3) Ketinggian muka air laut di Pasar Ikan sudah mencapai **170 – 200 cm (siaga III)**
- 4) Curah hujan **< 100 mm/dasarian**
- 5) **Akses Jalan Yang Terganggu**, dengan tinggi genangan berkisar >10 s/d 75cm.

B.3.2. Skenario Dampak

Skenario dampak menjelaskan asumsi dampak terhadap aspek-aspek kehidupan akibat suatu bencana. Skenario dampak berfokus pada aspek-aspek terdampak yang harus segera dipulihkan dalam fase Transisi ke Pemulihan. Pengembangan asumsi dampak mempertimbangkan kerentanan dan kapasitas masyarakat yang terkena dampak bencana seperti pemahaman masyarakat akan risiko, kesiapsiagaan, dan ketersediaan sumberdaya dalam penanggulangan bencana. Aspek-aspek terdampak banjir meliputi :

a) Aspek Kependudukan

Perkiraan Risiko Penduduk Wilayah Terdampak (Per Wilayah) pada saat Transisi ke Pemulihan tahun 2016 berdasarkan data BPBD Provinsi DKI Jakarta, hasil analisa data kejadian dari tahun 2013 sampai dengan 2015, sebagai berikut :

- 1) Sebaran banjir akan berdampak pada **11 kecamatan, 16 Kelurahan, 69 RW**
- 2) Jumlah penduduk yang terdampak banjir : **254.316 Jiwa**
- 3) Penduduk yang terancam jiwa : **0 jiwa.**
- 4) Jumlah penduduk yang mengungsi : **7.629 Jiwa.**
- 5) Jumlah penduduk risiko tinggi : **381 Jiwa.** (5% dari total pengungsi)
- 6) Jumlah penduduk yang sakit : **763 Jiwa.** (10% dari total pengungsi)

b) Aspek Kewilayahan

Perkiraan wilayah terdampak pada saat Transisi ke Pemulihan tahun 2017 berdasarkan data BPBD Provinsi DKI Jakarta, hasil analisa data kejadian dari tahun 2013 sampai dengan 2016, sebagai berikut :

NO	KECAMATAN		KELURAHAN	RW	Jumlah RW	
1	JAKARTA BARAT					
	1	CENGKARENG	1	RAWA BUAYA	01, 02, 04, 011	4
	2	KALI DERES	2	TEGAL ALUR	03, 04, 05, 09, 012	5
	3	KEMBANGAN	3	KEMBANGAN UTARA	03, 04, 05, 010	4
	JAKARTA SELATAN					
	1	KEBAYORAN LAMA	1	CIPULIR	010	1
			2	PONDOK PINANG	005	1
	2	CILANDAK	3	PONDOK LABU	01, 03, 07, 09, 010	5
	3	MAMPANG PRAPATAN	4	BANGKA	02, 03, 04	3
	4	PASAR MINGGU	5	PEJATEN TIMUR	01, 03, 05, 06-010	8
			6	JATI PADANG	02-06, 08-010	8
	JAKARTA TIMUR					
	1	JATINEGARA	1	BIDARA CINA	05, 07, 011, 014, 015	5
			2	KAMPUNG MELAYU	01-08	8
	2	KRAMAT JATI	3	CAWANG	01, 02, 03, 05, 08, 012	6
			4	CILILITAN	06, 07	2
	3	MAKASAR	5	CIPINANG MELAYU	03, 04	2
	JAKARTA UTARA					
	1	PENJARINGAN	1	PLUIT	01, 05, 011, 016, 020, 021	6
			2	PENJARINGAN	017	1
JUMLAH TOTAL	11	Kecamatan	16	Kelurahan		69

Sumber: Hasil Rekapitulasi Data Laporan PUSDALOPS BPBD, Tahun 2015

c) Aspek Obyek Vital

Perkiraan obyek vital terdampak pada saat Transisi ke Pemulihan tahun 2016 berdasarkan data BPBD Provinsi DKI Jakarta, hasil analisa data kejadian dari tahun 2013, sebagai berikut :

1. Jumlah Kantor Pemerintahan terdampak : **8 Unit;**
2. Jumlah Puskesmas terdampak : **4 Unit;**
3. Jumlah Rumah Sakit terdampak : **1 Unit;**
4. Jumlah Sekolah terdampak : **39 Unit;**
5. Jumlah Universitas terdampak : **2 Unit;**
6. Jumlah Stasiun Kereta Api terdampak : **0 Unit;**
7. Jumlah Gardu Listrik Tergenang : **2 Unit.**

d)Aspek Akses Transportasi

Untuk kondisi tanggap darurat diperkirakan jalur jalan yang terganggu akibat genangan banjir sama dengan kondisi tanggap darurat yaitu 82 lokasi, namun ketinggian air hanya 30 s.d 50 cm dengan lama genangan dibawah 2 jam. s.d 4 jam, adapun rincian wilayah yang tergenang antara lain :

No	Wilayah	Lokasi Tergenang	Jumlah
1	Jakarta Barat	1. Citraland-Cengkareng, 2. Rawa Buaya 3. Jl. S. Parman, 4. Jl. Kyai Tapa,	4
2	Jakarta Utara	1. Tl. Podomoro, 2. Teluk Gong, 3. Sunter Jaya RT 06/09, 4. Cilincing KBN	4
3	Jakarta Timur	1. Jl. DI Panjaitan, 2. Jl. Swadaya Duren Sawit, 3. Dpn RS Duren Sawit, 4. Perintis Kemerdekaan, 5. Jl. Pinang Ranti	5
4	Jakarta Pusat	1. TL. Coca Cola (Cepu 13), 2. Kolong Lenmark (Dukuh Bawah), 3. Gn. Sahari, 4. Jl. Latuharhary, 5. Jl. Letjen Suprpto,	5
5	Jakarta Selatan	1. Jl. Raya Cileduk dpn BNI, 2. Jl. Bank, 3. Kalibata-Dewi Sartika (Jmbtn Ciliwung), 4. Depan Tarakanita, 5. Deplu-Pesanggrahan, 6. Komplek POLRI pd. Karya, 7. Pd. Karya Jl. Bangka 9-11	7
Jumlah lokasi/kawasan yang tergenang			25

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Penanganan terhadap warga terdampak dan korban banjir perlu segera dilakukan agar semua warga terdampak dan korban dapat segera tertolong, berbagai fasilitas dan infrastruktur dapat diperbaiki serta nantinya semua aktivitas masyarakat dapat berjalan normal kembali, maka pemerintah memerlukan beberapa kebijakan dan strategi berdasarkan pada norma universal, konstitusi, peraturan, budaya, norma adat, norma agama dan lain-lain.

A. Tujuan

Dokumen rencana kontinjensi ini disusun sebagai pedoman penanganan bencana banjir tahun 2017 yang diaktifkan sesuai syarat, kriteria dan aturan yang telah ditetapkan. Selain itu dokumen ini menjadi dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan pada saat siaga, tanggap dan Transisi ke Pemulihan bencana dalam melakukan penanggulangan bencana yang cepat dan efektif.

B. Kebijakan

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 7 ayat 1 dicantumkan mengenai Pemerintah atau Pemerintah Daerah menyatakan status darurat.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dinyatakan siapa yang menyatakan status darurat, tanpa indikasi. Di UU Nomor 24 Tahun 27 tentang PB itu disebutkan indikator status keadaan darurat pada Pasal 7 ayat 2, yaitu:

- 1. Jumlah korban;**
- 2. Kerugian harta benda;**
- 3. Kerusakan prasarana dan sarana;**
- 4. Cakupan luas wilayah yang terkena dampak;**
- 5. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.**

Status darurat baru dinyatakan setelah kaji cepat telah dilakukan dan memberikan analisis kaji cepat, menyangkut peristiwa bencana dan dampak bencana yang terjadi. Dalam kaji cepat itu, sesuai dengan amanah UU No. 24 Tahun 2007 pasal 49, yang perlu dikaji adalah:

- 1. cakupan lokasi bencana;**
- 2. jumlah korban;**
- 3. kerusakan prasarana dan sarana;**
- 4. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;**
- 5. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.**

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan gender di Bidang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB nomor 14 tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana banjir memperhatikan perlindungan, pemenuhan hak, kemudahan akses dan partisipasi penyandang disabilitas serta responsif gender dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil .

C. Strategi

Strategi yang ditetapkan untuk menangani aspek-aspek terdampak banjir adalah dengan menjalankan Pemenuhan 7 Klaster Prioritas sebagaimana ditetapkan dalam SK Kepala BNPB Nomor 273 Tahun 2014, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Pelaksana Standart Pelayanan Minimum Tingkat Kota Administrasi Per Klaster

No	KLASTER	STANDART PELAYANAN MINIMUM	PELAKSANA PADA SAAT KESIAPSIAGAAN	PELAKSANA PADA SAAT TANGGAP DARURAT
1	Pencarian dan Penyelamatan	Pencarian dan penyelamatan	Leading sektor: Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Supporting : Satgaspol PP, Sudinikes, PMI	Leading Sektor: Dinas PKP Supporting: Satpol PP, Dinkes, PMI, SAR Jakarta,
2	Pengungsian dan Perlindungan	Keamanan, tempat penampungan sementara (huntara), manajemen pengungsian, perlindungan kelompok rentan, psikososial	Leading Sektor: BPBD Supporting: Sudin Sosial, Satgaspol PP, Sudin Pemuda dan OR, Sudin Pendidikan, POLRES, KODIM, Sudin Lingkungan Hidup	Leading Sektor: BPBD Supporting: Dinas Sosial, Satpol PP, KODAM Jaya, PMJ, Koops AU1, Ko Armabar, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda dan OR
3	Kesehatan	Medis, Identifikasi korban, kesehatan reproduksi, dampak psikososial dan juga kualitas gizi, air dan sanitasi	Leading Sektor: Sudin Kesehatan Supporting: PKM Kecamatan & Kelurahan PMI, RSUD, AGD, Bidokkes PMI, Sudin Sumber Daya Air	Leading Sektor: Dinas Kesehatan Supporting: RSUD, AGD Dinkes, Bidokkes PMJ, Kodam Jaya, Dinas Sumber Daya Air, PMI

No	KLASTER	STANDART PELAYANAN MINIMUM	PELAKSANA PADA SAAT KESIAPSIAGAAN	PELAKSANA PADA SAAT TANGGAP DARURAT
4	Logistik	Permakanan, sandang, system logistic distribusi barang bantuan dan peralatan	Leading Sektor: Sudin Sosial Supporting: Satgaspol PP, Tagana, PMI, Sudinhub, POLRES, KODIM,	Leading Sektor: Dinas Sosial Supporting: Satpol PP, PMI, Dishub, PMJ, Kodam Jaya,
5	Sarana dan Prasarana	Akses transportasi, telekomunikasi, energy, transportasi, pembersihan puing, air dan sanitasi (umum), perumahan (hunta)	Leading Sektor: Sudin Lingkungan Hidup Supporting: Sudin Kominfo dan Statistik, Sudinhub, POLRES, KODIM, Sudin Perindustrian dan Energi, Sudin Sosial, PLN, PAM Jaya, Sudin PKP, Satgaspol PP	Leading Sektor: Dinas Lingkungan Hidup Supporting: Dinas Kominfo dan Statistik, Dishub, PMJ, Kodam Jaya, Koops AU1, Ko Armabar, PLN, DPE, Dinsos, PAM Jaya, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
6	Pendidikan	Belajar mengajar formal dan informal, sekolah darurat, kerohanian. bimbingan dan penyuluhan bagi anak dan dewasa,	Leading Sektor: Sudin Pendidikan Supporting: Depag, PMI, Sudin Sosial	Leading Sektor: Dinas Pendidikan Supporting: Depag, PMI, Dinas Sosial
7	Peran Serta Masyarakat	Menghimpun dan mengkoordinasikan potensi masyarakat untuk mendukung 6 Klaster lainnya	Leading Sektor : BPBD Provinsi DKI Jakarta Supporting : Forum PRB	Leading Sektor : BPBD Provinsi DKI Jakarta Supporting : Forum PRB

BAB IV

PERENCANAAN KLASTER

Dalam dokumen rencana kontinjensi banjir Provinsi DKI Jakarta tahun 2017, menjelaskan uraian upaya pemenuhan standart pelayanan minimum per klaster. Dari 8 klaster yang diamanatkan dalam Peraturan Kepala BNPB, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan untuk menyiapkan pemenuhan kebutuhan 7 klaster pada saat kondisi darurat meliputi : (1) klaster pencarian dan penyelamatan; (2) klaster pengungsian dan perlindungan, (3) klaster kesehatan; (4) klaster logistik; (5) klaster sarana dan prasarana (6) klaster pendidikan ; dan (7) klaster peran serta masyarakat.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana saat ini berbasis wilayah, prioritas pelaksanaan aktivitas dititik beratkan pada tingkat Kelurahan sementara Kecamatan, UKPD Kota Administrasi dan SKPD Provinsi berfungsi sebagai pendukung ketika Kelurahan membutuhkan dukungan kekuatan baik itu SDM maupun sarana dan prasarananya.

1. Klaster Pencarian dan Penyelamatan

A. Situasi

Untuk menekan jatuhnya korban jiwa maka personil dan peralatan pendukung Tim Penyelamatan dan Evakuasi disiagakan selama 24 jam penuh sejak ditetapkan masa Kesiapsiagaan banjir. Jumlah personil dan peralatan akan ditambah saat diakifkannya masa tanggap darurat.

Perkiraan jumlah petugas dari Klaster Pencarian dan Penyelamatan pada masing-masing Kelurahan disesuaikan dengan jumlah pengungsi pada setiap Kelurahan.

Tim Evakuasi perlu memperhatikan aspek gender dan pelayanan bagi kelompok rentan terutama bagi penyandang disabilitas.

B. Pola Komando dan Kegiatan

No	Kegiatan	Koordinator	Pendukung	Komando
1	Menyediakan personil dan sarana pencarian dan penyelamatan	Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Tim Rescue Satpol PP, Tim Kantor SAR Jakarta, Tim Rescue PMI Jakarta Tim AGD Dinkes	Kasudin PKP (Penanggulanga n Kebakaran dan Penyelamatan)
2	Melakukan operasi pencarian dan penyelamatan serta pengamanan	Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Tim Rescue Satgaspol PP, Tim Kantor SAR Jakarta, Tim Rescue PMI Jakarta Tim AGD Dinkes	Kasudin PKP (Penanggulanga n Kebakaran dan Penyelamatan)
3	Memfasilitasi kelancaran tindakan rujukan	Sudin Kesehatan	Tim AGD Sudinkes Tim Rescue Sudin PKP Tim Rescue PMI Jakarta	Kasudin Kesehatan

C. Proyeksi Kebutuhan

KEGIATAN	KEBUTUHAN OPERASIONAL	SKPD/UKPD	PERKIRAAN KEBUTUHAN	KAPASITAS	WAKTU TANGGAP	TITIK KUMPUL SIAGA
1 Pencarian dan penyelamatan	1 tim penyelamat dan perlengkapannya	Sudin PKP	1.206 Personil (6 pers/tim)	3.778 Personil	2 jam	Kantor Kelurahan
	2 Perahu dan perlengkapannya	Sudin PKP	201 unit	175 unit	1 hari	Kantor Kelurahan
	3 Jaket Plampung untuk korban	Sudin PKP	603 pcs	1.467 pcs	1 hari	Kantor Kelurahan
	4 HT	Sudin PKP	49 unit		1 hari	Kantor Kelurahan
	5 Kendaraan Personil	Satpol PP Kelurahan	49 unit	143 unit	1 hari	Kantor Kelurahan
	6 Ring Bouy/Ban Dalam	Sudin PKP dan Kelurahan	603 pcs	371 pcs	1 hari	Kantor Kelurahan
	7 Tali Carmantel/ Penyelamat	Sudin PKP dan Kelurahan	603 set	41 rol	1 hari	Kantor Kelurahan
	8 Ambulance, Supir dan Paramedis	AGD + Puskesmas Kecamatan	49 tim	84 Unit	1 hari	Kantor Kelurahan
	9 Tandu	puskes kecamatan	49 unit		1 hari	Kantor Kelurahan
2 Patroli pengamanan wilayah dan perlindungan kelompok rentan	1 Kendaraan Personil	kelurahan	49 unit	57 unit	1 hari	Kantor Kelurahan
	2 Personil patroli + HT	Binmas/babinsa dan satgas pol PP	201 tim	1.617 personil	1 hari	Kantor Kelurahan

2. Klaster Pengungsian dan Perlindungan

A. Situasi

Apabila terjadi bencana banjir maka diperkirakan jumlah penduduk di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta yang terdampak sebanyak 649.910 jiwa dan yang mengungsi dikarenakan bencana tersebut sebanyak 19.497 jiwa. Jumlah pengungsi tersebut tersebar di **72 tempat pengungsian**. Diperkirakan sekitar 25% dari warga yang mengungsi tersebut termasuk kelompok rentan, diantaranya adalah ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, balita, kaum disabilitas, lansia, dan sejumlah warga yang sedang menderita sakit atau mempunyai riwayat penyakit yang sensitive dengan bencana banjir.

B. Pola Komando dan Kegiatan

No	Kegiatan	Koordinator	Pendukung	Komando
1	Melakukan kaji cepat dan pendataan	BPBD	Bimas Mitra Polres Babinsa, Satgaspol PP	Kalak BPBD
2	Patroli pengamanan wilayah dan perlindungan kelompok rentan	Satgaspol PP	Bimas Mitra Polres Babinsa	Kasatgaspol PP
3	Melakukan piket siaga banjir	Satgaspol PP	Polres, Kodim,	Kasatgaspol PP
4	Menyiapkan tempat/ tenda pengungsian yang mengakomodir kelompok rentan	BPBD	Sudin Sosial, Sudin Olah Raga, Sudin Pendidikan, Sudin Kehutanan	BPBD
5	Menyiapkan sarana penanganan sampah/ lumpur akibat banjir.	Sudin Lingkungan Hidup	Sudin Sumber Daya Air	Kasudin Lingkungan Hidup
6	Menyiapkan sarana pendampingan sosial & psikososial untuk warga terdampak yang dewasa, disesuaikan dengan adat istiadat setempat.	Sudin Sosial	PMI DKI Jakarta	Kasudin Sosial

C. Proyeksi Kebutuhan

KEGIATAN	KEBUTUHAN OPERASIONAL	SKPD/UKPD	PERKIRAAN KEBUTUHAN	KAPASITAS	WAKTU TANGGAP	TIPIK KUMPUL SIAGA
1 peralatan dasar	1 Alas tidur	BPBD	804 pcs		1 hari	BPBD
	2 Tenda dan personil	Sudin Sosial	201 set	30 unit	1 hari	Sudin Sosial
	3 Genset dan personil	DPE	201 unit	26 unit	1 hari	DPE
	4 Lampu penerangan	DPE	201 set	110 buah	1 hari	DPE
2 sarana pendukung lingkungan	1 Truck sampah dan personil	Sudin Lingkungan Hidup	49 unit	75 buah	1 hari	Sudin Lingkungan Hidup
	2 Kantong plastik tempat sampah	Sudin Lingkungan Hidup	201 set	1000 buah	1 hari	Sudin Lingkungan Hidup
	3 Gerobak sampah	Lurah	201 unit		1 hari	Lurah
	4 WC umum	Sudin Lingkungan Hidup	49 set	15 set	1 hari	Lurah
3 Air Bersih	1 Cadangan air bersih	Kecamatan	49 unit	57 unit	1 hari	Lurah

3. Klaster Kesehatan

A. Situasi

Apabila terjadi bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta, diperkirakan akan terdapat masyarakat yang menjadi korban. Terdapat lebih dari 92 rumah sakit/sarana kesehatan yang tersebar di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya yang tergabung dalam IKS (Ikatan Kerja Sama) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk menjamin kesehatan korban banjir dan pengungsi maka dipersiapkan pos kesehatan sejumlah 1 Pos Pelayanan Kesehatan jika terdapat minimal 100 orang yang mengungsi. Pos Pelayanan Kesehatan beroperasi 24 jam penuh dibagi dalam 3 shift selama Kesiapsiagaan bencana. Setiap Pos Pelayanan Kesehatan yang diaktifkan mampu melayani 100 orang dalam waktu 24 jam. Pos kesehatan didirikan ketika pengungsi di suatu wilayah melebihi 100 orang.

Pembiayaan untuk korban bencana banjir menggunakan anggaran bencana yang melekat di UPT Jamkesda Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

B. Pola Komando dan Kegiatan

No	Kegiatan	Koordinator	Supporting	Komando
1.	Mendata jumlah korban dan pengungsi (kelompok rentan dan berkebutuhan khusus)	Sudin Kesehatan	PKM Kecamatan, PKM Kelurahan, PMI Jakarta	Kepala Sudin Kesehatan
2.	Membentuk Pos Kesehatan	Sudin Kesehatan	PMI Jakarta, PKM Kecamatan, PKM Kelurahan	Kepala Sudin Kesehatan
3.	Menyiapkan paket obat, bahan habis pakai, dan alat kesehatan	Sudin Kesehatan	PMI Jakarta, PKM Kecamatan, PKM Kelurahan, RSUD	Kepala Sudin Kesehatan
4.	Memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar	Sudin Kesehatan	Koops AU1, Kodam Jaya, RSUD, Bidokkes Polda, Ko Armabar, PKM (Kel & Kec), AGD Dinkes, PMI Jakarta,	Kepala Sudin Kesehatan
5.	Menyiapkan Tenaga Medis dan Non Medis	Sudin Kesehatan	Koops AU1, Kodam Jaya, Bidokkes Polda, Ko Armabar, PKM (Kel & Kec), AGD Dinkes, PMI Jakarta, RSUD	Kepala Sudin Kesehatan
6.	Menyiapkan Pelayanan Rujukan	Sudin Kesehatan	AGD, PKM Kec, RS (RSUD, RS TNI POLRI)	Kepala Sudin Kesehatan
7.	Menyiapkan Ruang Triage	Sudin Kesehatan	RSUD, RS Swasta, Puskesmas Kecamatan	Kepala Sudin Kesehatan

No	Kegiatan	Koordinator	Supporting	Komando
8.	Mendirikan RS Lapangan	Sudin Kesehatan	RSUD, Kesdam Jaya, KoArmabar, Koops AU1, RS Swasta	Kepala Sudin Kesehatan
9.	Pendampingan Psiko-Sosial <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan rekreasi • Kegiatan kerja bakti • Kegiatan olah raga atau kesenian 	Sudin Sosial	Puskesmas Kecamatan, PMI, Polwan Polda Metro Jaya, Kesdam Jaya, Lapesi KoArmabar, Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa DKI Jakarta	Kepala Sudin Sosial
10.	Melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas gizi bagi korban dan pengungsi	Sudin Kesehatan	PKM Kecamatan, PKM Kelurahan,	Kepala Sudin Pertanian
11.	Memberikan pelayanan kesehatan reproduksi	Sudin Kesehatan	Puskesmas Kec, Sudinkes, Dinkes	Kepala Sudin Kesehatan
12.	Menyediakan sarana penampung air limbah domestik di tempat pengungsian	Sudin Lingkungan Hidup	Sudin Tata Kota, Sudin Sumber Daya Air	Kepala Sudin Lingkungan Hidup

C. Proyeksi Kebutuhan

KEGIATAN	KEBUTUHAN OPERASIONAL	SKPD/UKPD	PERKIRAAN KEBUTUHAN	KAPASITAS	WAKTU TANGGAP	LOKASI KUMPULAN SIAGA
1 Pos Kesehatan	1 Posko kesehatan, personil dan sarana pendukung	Sudin Kesehatan	49 pos	44 posko	1 hari	Sudin Kesehatan
	2 Ambulance, personil dan sarana pendukung	Sudin Kesehatan	49 tim	84 unit	1 hari	Sudin Kesehatan
2 Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Antisipasi penyakit menular saat banjir	Sudin Kesehatan	49 tim	6.844 personil	1 hari	Sudin Kesehatan

4. Klaster Logistik

A. Situasi

Bencana banjir yang diperkirakan akan melanda lima wilayah kota di Provinsi DKI Jakarta pada dasarian ketiga bulan Februari 2015 memaksa sekitar 56.113 jiwa mengungsi.

B. Pola Komando dan Kegiatan

Kegiatan sektor Logistik bertugas untuk memberikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pengungsi, petugas pertolongan kedaruratan dalam bencana banjir selama masa tanggap darurat yang diasumsikan 7 hari

No	Kegiatan	Koordinator	Pendukung	Komando
1	Mendirikan Pos Dapur Umum	Sudin Sosial	PMI, KODIM, PKPU, Tagana, POLRES, Koops AU1, Ko Armabar, BPBD, Satgaspol PP	Kasudin Sosial
2	Mendirikan Pos Logistik	Sudin Sosial	PMI, KODIM, PKPU, Tagana, POLRES, Koops AU1, Ko Armabar, BPBD, Satgaspol PP	Kasudin Sosial
3	Menghimpun, dan menyortir bantuan logistik	BPBD	PMI, KODIM, PKPU, Tagana, POLRES, Koops AU1, Ko Armabar, Sudin Sosial, Satgaspol PP	BPBD
4	Melaksanakan pendistribusian makanan siap saji	Sudin Sosial	PMI, KODIM, PKPU, Tagana, POLRES, Koops AU1, Ko Armabar, BPBD, Satgaspol PP	Kasudin Sosial
5	Melaksanakan pendistribusian logistic	Sudin Sosial	PMI, KODIM, PKPU, Tagana, POLRES, Koops AU1, Ko Armabar, BPBD, Satgaspol PP	Kasudin Sosial

C. Proyeksi Kebutuhan :

KEGIATAN	KEBUTUHAN OPERASIONAL	SKPD/UKPD	PERKIRAAN KEBUTUHAN	KAPASITAS	WAKTU TANGGAP	ETIK KUMPUL SIAGA
1 dapur umum	1 Personil dan sarana pendukung	Sudin Sosial	49 paket	900 orang di 30 posko	3 jam	Sudin Sosial
2 Logistik	2 Pengelolaan logistik	Lurah	201 tim		1 hari	Lurah
	3 Pendampingan	BPBD	49 tim		1 hari	BPBD

5. Klaster Sarana dan Prasarana

A. Situasi

Bencana Banjir tersebut akan menyebabkan bangunan, jalan, jembatan serta fasilitas umum lainnya berpotensi tergenang air. Beberapa sarana dan prasarana vital yang rusak akibat diterjang banjir harus diperbaiki dengan segera sehingga dapat berfungsi kembali.

B. Pola Komando dan Kegiatan

No	Kegiatan	Koordinator	Pendukung	Komando
1	Menyiapkan alat komunikasi, Informatika & Multimedia	Sudin Kominfo dan Statistik	Satgaspol PP, ORARI, POLRES, KODIM, Senkom, Telkom	Kasudin dan Statistik
2	Menyusun tata kelola sarana transportasi jalur evakuasi dan jalur logistik	Sudin Perhubungan	Satgaspol PP, POLRES, KODIM, Sudin Sosial, Sudin PKP	Kasudin Perhubungan
3	Menyiapkan sarana transportasi	Sudin Perhubungan	Satgaspol PP, POLRES, KODIM, Sudin PKP	Kasudin Perhubungan
4	Menyiapkan sarana prasarana untuk memenuhi pasokan energy	Sudin Perindustrian dan Energi	PLN, Sudin PU, Sudin PKP, KODIM, POLRES	Kasudin Perindustrian dan Energi
5	Menyiapkan Sarana Penampung Air Limbah Domestik Pengungsi.	Sudin Lingkungan Hidup	Sudin Sumber Daya Air, KLH, Sudin PKP, Sudin PU	Kasudin Lingkungan Hidup
6	Menyediakan Sarana Air bersih, dan Sanitasi.	Sudin Sumber Daya Air	Sudin PKP, Sudin Sosial, Satgaspol PP, PAM Jaya	Kasudin Sumber Daya Air
7	Menyiapkan sarana untuk meminimalisir debit genangan air di lokasi banjir	Sudin Sumber Daya Air	Sudin PKP, Sudin Sosial, Satgaspol PP, PAM Jaya	Kasudin Sumber Daya Air
8	Menyiapkan sarana prasarana vital untuk pelayanan public	Sudin Sumber Daya Air	Satgaspol PP, KODIM, POLRES, ORARI, PLN, Sudin Sosial	Kasudin Sumber Daya Air
9	Menyiapkan sarana untuk pemulihan kebersihan lingkungan	Sudin Lingkungan Hidup	Satgaspol PP, KODIM, Sudin Kesehatan	Kasudin Lingkungan Hidup

C. Proyeksi Kebutuhan :

KEGIATAN	KEBUTUHAN OPERASIONAL	SKPD/UKPD	PERKIRAAN KEBUTUHAN	WAKTU TANGGAP	TITIK KUMPUL SIAGA
1 transportasi	1 Reayasa lalu lintas	Polsek + sudin hub	49 tim	3 jam	Polsek + sudin hub
2 Informasi	2 Data dasar kejadian bencana	Kelurahan	49 Set	1 jam	Kelurahan

6. Klaster Pendidikan

A. Situasi

Apabila terjadi bencana banjir maka diperkirakan jumlah penduduk di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta yang mengungsi sebanyak 19.497 jiwa. Jumlah pelajar di jenjang sekolah dasar yang terganggu kegiatan belajar mengajarnya diperkirakan 10% (1.950 jiwa).

B. Kegiatan

No	Kegiatan	Koordinator	Pendukung	Komando
1	Menyiapkan sarana belajar mengajar baik secara formal dan non formal	Sudin Pendidikan	Lurah, Camat, BPBD, Sudin Sosial, PMI,	Kasudin Pendidikan
2	Melaksanakan proses belajar mengajar pada saat darurat	Sudin Pendidikan	Lurah, Camat, BPBD, Sudin Sosial, PMI	Kasudin Pendidikan
3	Memberikan pelayanan bimbingan dan penyuluhan bagi anak-anak dewasa.	Sudin Pendidikan	Lurah, Camat, BPBD, Sudin Sosial, PMI	Kasudin Pendidikan
4	Memberikan penguatan kerohanian bagi korban dan pengungsi.	Sudin Pendidikan	Lurah, Camat, BPBD, Sudin Sosial, PMI	Kasudin Pendidikan

KEGIATAN	
1	Belajar mengajar

7. Klaster Peran Serta Masyarakat

A. Situasi

Apabila terjadi bencana banjir maka diperkirakan kemampuan Pemerintah perlu ditunjang oleh peran serta masyarakat, oleh karena itu klaster pada peran serta masyarakat bertujuan untuk menutupi kekurangan dari sumber daya daerah dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana.

B. Pola Komando dan Kegiatan

No	Kegiatan	Koordinator	Pendukung	Komando
1	Menghimpun dan mendata kekurangan sumberdaya di Posko Lapangan	BPBD	Forum PRB dan Organisasi penggiat penanggulangan bencana	Kepala Pelaksana BPBD
2	Melakukan pendampingan bersama petugas di Posko Lapangan	BPBD	Forum PRB dan Organisasi penggiat penanggulangan bencana	Kepala Pelaksana BPBD
3	Memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana	BPBD	Forum PRB dan Organisasi penggiat penanggulangan bencana	Kepala Pelaksana BPBD

BAB V

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Rencana Kontinjensi ini diaktivasi menjadi Rencana Operasi beberapa saat sebelum terjadi bencana (sesuai skenario yang telah ditetapkan pada Bab IV) setelah dilakukan penilaian awal secara cepat dan penyesuaian komponen kebutuhan sesuai kondisi dan intensitas bencana.
2. Dokumen Rencana Kontinjensi Banjir Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dilengkapi dengan Rencana Operasional (Lampiran VI.1) yang menggambarkan tentang mekanisme pemenuhan kebutuhan 7 (tujuh) klaster, meliputi klaster :
 1. Pencarian dan Penyelamatan
 2. Pengungsian dan Perlindungan
 3. Kesehatan
 4. Logistik
 5. Sarana dan Prasarana
 6. Pendidikan
 7. Peran serta masyarakat
3. Skenario waktu pada dokumen tidak mengikat sehingga apabila terdapat potensi cuaca ekstrem diluar waktu yang telah ditetapkan maka dapat disesuaikan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi dan SKPD terkait dan Lurah wilayah terdampak melakukan langkah kesiapsiagaan antisipasi banjir.
4. Perlu dibangun jejaring yang lebih luas (termasuk dengan lembaga usaha / melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi DKI Jakarta agar seluruh sumber daya di Provinsi DKI Jakarta dapat dioptimalkan dalam penanggulangan bencana baik dalam tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, maupun pasca bencana.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kontinjensi ini dibuat sebagai acuan dan referensi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan segenap pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017.

Jumlah anggaran biaya yang muncul dari beberapa klasteryang termuat dalam Rencana Kontinjensi ini bukan merupakan Daftar Isian Kegiatan/Dokumen Pelaksanaan Anggaran tetapi merupakan proyeksi kebutuhan apabila bencana seperti yang diskenariokan benar-benar terjadi. Kebutuhan ini dipenuhi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, baik dari pemerintah, lembaga usaha, maupun masyarakat.

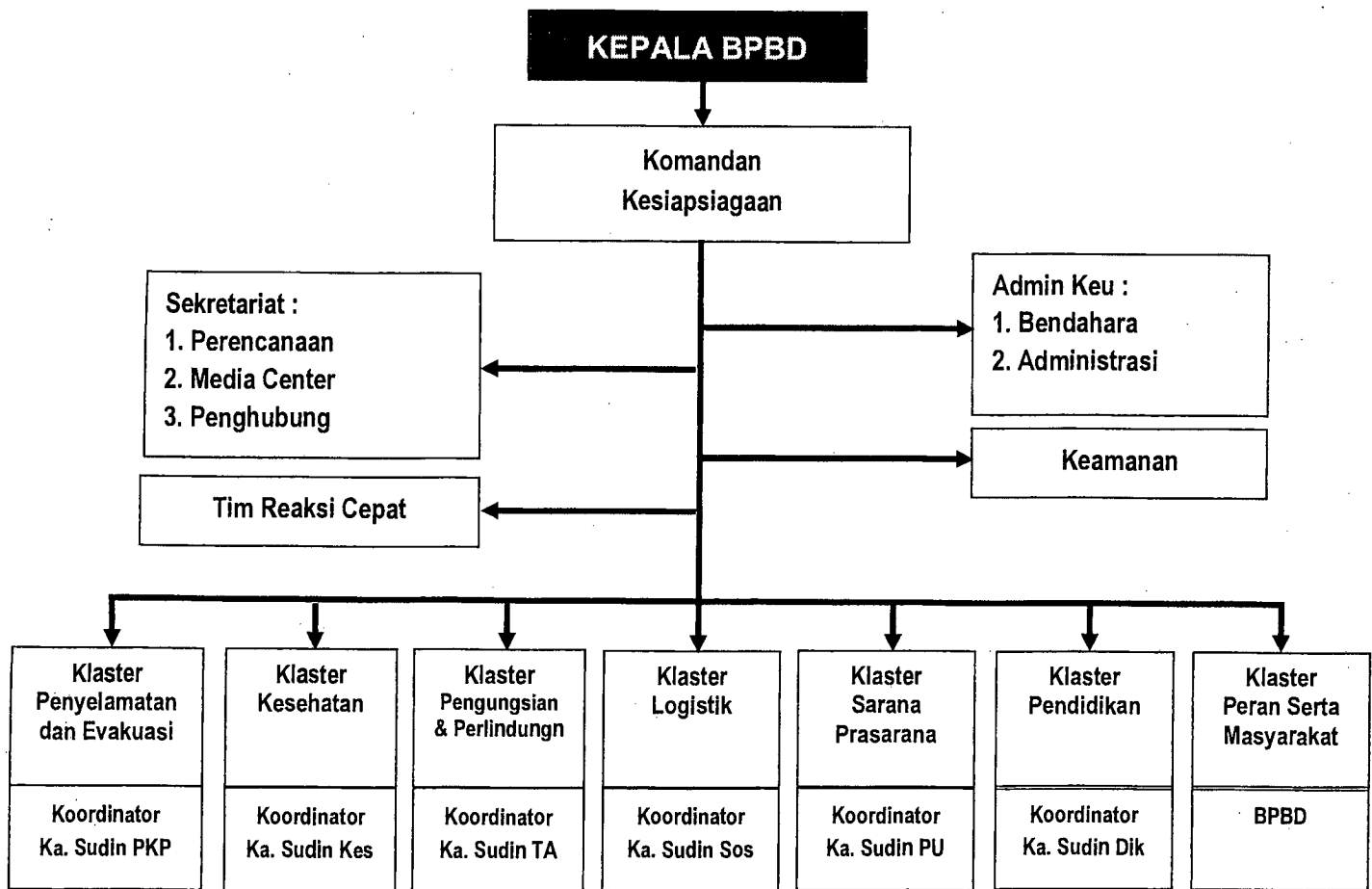
Rencana kontinjensi ini masih perlu penyempurnaan dan *review* secara berkala untuk pemutakhiran data dan informasi.

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Lampiran 1 : STRUKTUR KOMANDO KESIAPSIAGAAN



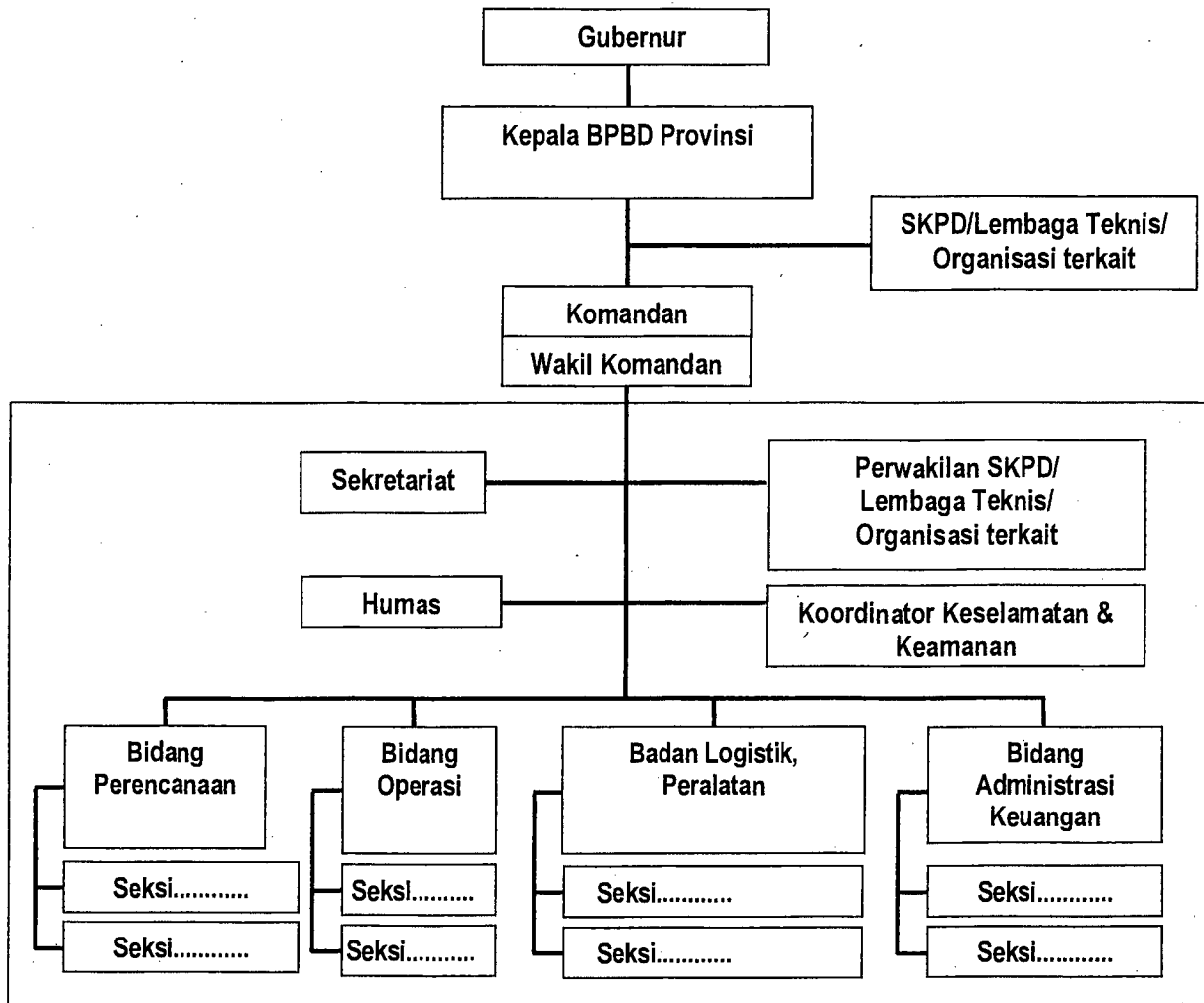
Lampiran 2 :

**URAIAN TUGAS
KOMANDO KESIAPSIAGAAN**

No	Kedudukan	Uraian Tugas	Keterangan
1.	Kepala BPBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan umum mengenai kebijakan penanganan Kesiapsiagaan 2. Memberikan masukan dalam pelaksanaan operasional siaga darurat 3. Mengevaluasi pelaksanaan siaga darurat 	
2.	Komandan Pos Komando Lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengaktifkan Pos Komando Siaga Darurat Bencana 2. Membuat rencana operasi, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi Kesiapsiagaan bencana 3. Menempatkan petugas perwakilan instansi/ lembaga/ organisasi terkait kedalam Bidang dan Klaster yang relevan 4. Memimpin rapat – rapat untuk memerintahkan, mengkoordinasikan, mensinergikan dan mensinkronisasikan operasi Klaster 5. Melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi 	
3.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi tentang kronologis dan dampak bencana serta menilai kerugian bencana secara cepat 2. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut serta penanggulangannya ke tingkat Kecamatan, dan BPBD 3. Menyelenggarakan administrasi umum 	
5.	Klaster Pencarian dan Penyelamatan	Mengkoordinir personil dan sarana pencarian dan penyelamatan untuk mendukung klaster di Kelurahan	
6.	Klaster Pengungsian dan Perlindungan	Mengkoordinir penyediaan lokasi evakuasi dan perlindungan serta pengamanan untuk mendukung klaster Kelurahan	
7.	Klaster Kesehatan	Mengkoordinir penyediaan pelayanan kesehatan untuk mendukung klaster Kelurahan	
8.	Klaster Logistik	Mengkoordinir pelayanan penyediaan logistik untuk mendukung Klaster Kelurahan	
9.	Klaster Sarana dan Prasarana	Mengkoordinir penyediaan sarana dan prasarana komunikasi, sarana transportasi, pasokan energy, sarana lain untuk mendukung klaster Kelurahan	
10.	Klaster Pendidikan	Mengkoordinir pelayanan pendidikan untuk mendukung klaster Kelurahan	
11.	Klaster Peran Serta Masyarakat	Mengkoordinir ketersediaan SDM dari unsur masyarakat untuk mendukung klaster Kelurahan	

Lampiran 3 :

**BAGAN STRUKTUR
POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
TINGKAT PROVINSI**



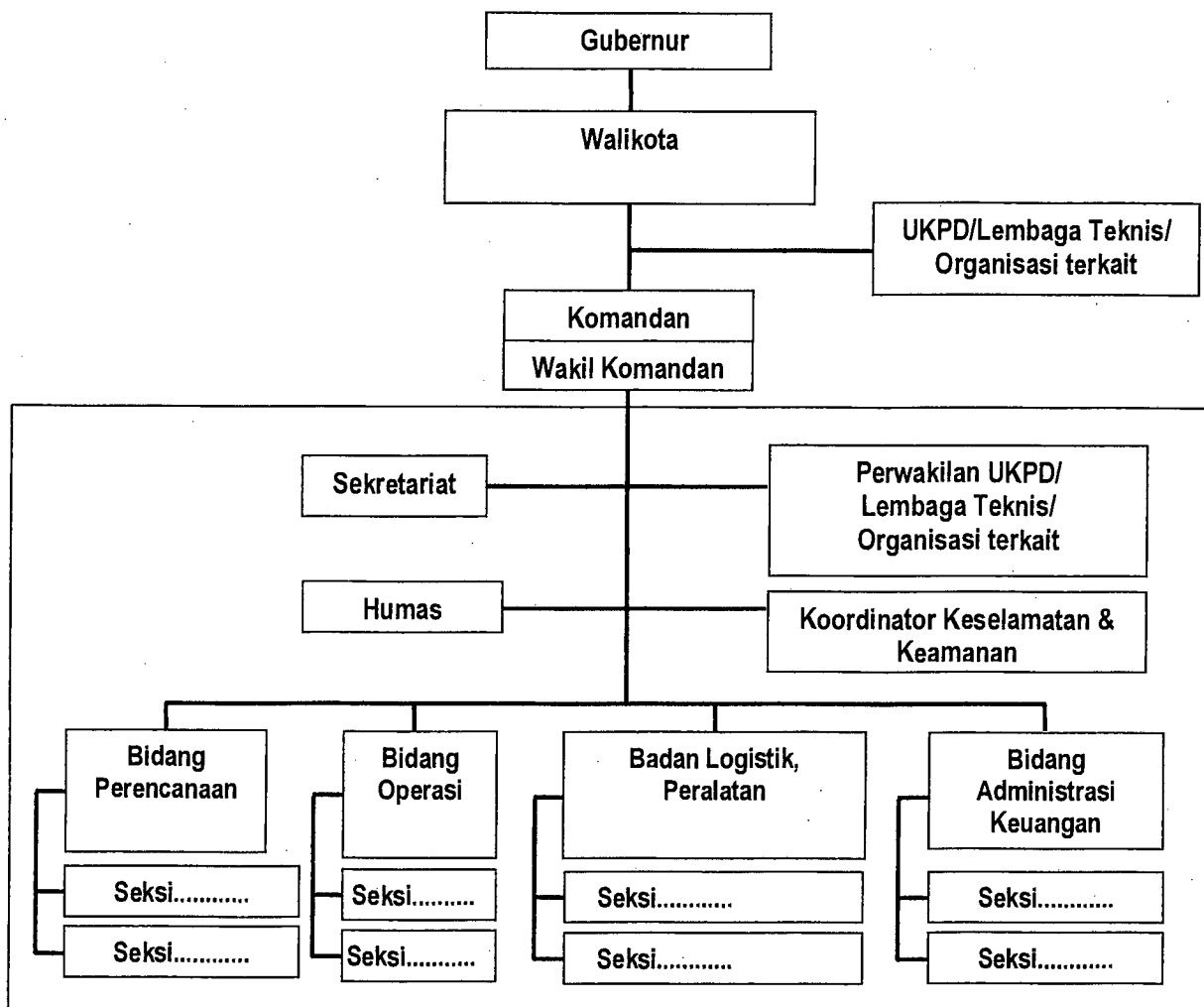
Keterangan :

————— Garis Komando

- ***Ketentuan lebih lanjut terkait struktur Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Tingkat Provinsi mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana***

Lampiran 4 :

**BAGAN STRUKTUR
POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI**



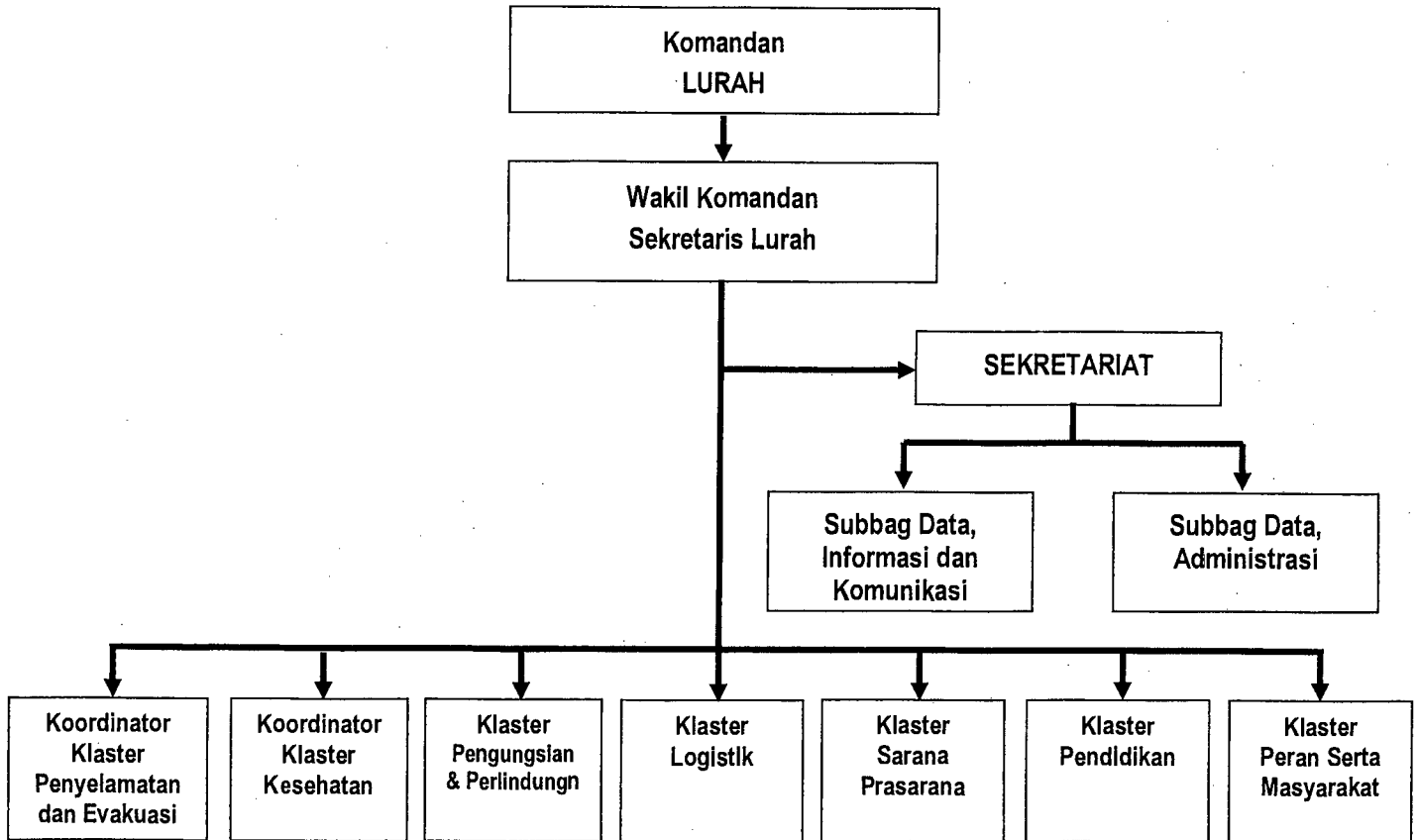
Keterangan :

————— Garis Komando

- ***Ketentuan lebih lanjut terkait struktur Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Tingkat Provinsi mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana***

Lampiran 5 :

**BAGAN STRUKTUR
POS KOMANDO LAPANGAN TINGKAT KELURAHAN**



Lampiran 6 :

**URAIAN TUGAS
POS KOMANDO LAPANGAN TINGKAT KELURAHAN**

No	Kedudukan	Uraian Tugas	Keterangan
1.	Pos Komando Lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 4. Melanjutkan kegiatan assesmen cepat terhadap kejadian bencanayang telah dilakukan oleh tim kaji cepat 5. Melakukan kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana 6. Memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana 7. Memberikan perlindungan terhadap korban bencana yang rentan 8. Memberikan pelayanan kepada korban bencanayang mengungsi 9. Melakukan perbaikan prasarana dan sara vital dengan segera 	
2.	Komandan Pos Komando Lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 6. Mengaktifkan Pos Komando Lapangan sebagai Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) di satu titik lokasi bencana 7. Membuat rencana operasi, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi darurat bencana 8. Menempatkan petugas perwakilan instansi/ lembaga/organisasi terkait kedalam Bidang dan Klaster yang relevan 9. Memimpin rapat – rapat Posko untuk memerintahkan, mengkoordinasikan, mensinergikan dan mensinkronisasikan operasi bidang-bidang 10. Melaksankana evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam sehari untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya 	
3.	Wakil Komandan Pos Komando Lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Komandan Posko Lapangan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi darurat bencana 2. Mengkoordinir tugas-tugas bagian Sekretariat mencakup Sub Bagian Data serta Informasi dan Komunikasi 3. Mewakili Komandan Posko Lapangan apabila berhalangan 	
4.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 4. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi tentang kronologis dan dampak bencanaserata menilai kerugian bencana secara cepat 5. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut serta penanggulangannya ke tingkat Kecamatan, dan BPBD 	

No	Kedudukan	Uraian Tugas	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan personil 7. Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Klaster Pos Komando Lapangan Darurat Bencana 	
5.	Klaster Pencarian dan Penyelamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan personil dan sarana pencarian dan penyelamatan 2. Melakukan operasi pencarian dan penyelamatan serta pengamanan 3. Memfasilitasi kelancaran tindakan rujukan 	
6.	Klaster Pengungsian dan Perlindungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kaji cepat dan pendataan 2. Patroli pengamanan wilayah dan perlindungan kelompok rentan 3. Melakukan piket siaga banjir 4. Menyiapkan tempat/ tenda pengungsian yang mengakomodir kelompok rentan 5. Menyiapkan sarana penanganan sampah/ lumpur akibat banjir. 6. Menyiapkan sarana pendampingan sosial & psikososial untuk warga terdampak yang dewasa, disesuaikan dengan adat istiadat setempat. 	
7.	Klaster Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendata jumlah korban dan pengungsi (kelompok rentan dan berkebutuhan khusus) 2. Membentuk Pos Kesehatan 3. Menyiapkan paket obat, bahan habis pakai, dan alat kesehatan 4. Memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar 5. Menyiapkan Tenaga Medis dan Non Medis 6. Menyiapkan Pelayanan Rujukan 7. Menyiapkan Ruang Triage 8. Mendirikan RS Lapangan 9. Pendampingan Psiko-Sosial <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan rekreasional • Kegiatan kerja bakti • Kegiatan olah raga atau kesenian 10. Melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas gizi bagi korban dan pengungsi 11. Memberikan pelayanan kesehatan reproduksi 12. Menyediakan sarana penampung air limbah domestik di tempat pengungsian 	
8.	Klaster Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendirikan Pos Dapur Umum 2. Mendirikan Pos Logistik 3. Menghimpun, dan menyortir bantuan logistik 4. Melaksanakan pendistribusian makanan siap saji 5. Melaksanakan pendistribusian logistic 	
9.	Klaster Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan alat komunikasi, Informatika & Multimedia 	

No	Kedudukan	Uraian Tugas	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Menyusun tata kelola sarana transportasi jalur evakuasi dan jalur logistik 3. Menyiapkan sarana transportasi 4. Menyiapkan sarana prasarana untuk memenuhi pasokan energy 5. Menyiapkan Sarana Penampung Air Limbah Domestik Pengungsi. 6. Menyediakan Sarana Air bersih, dan Sanitasi. 7. Menyiapkan sarana untuk meminimalisir debit genangan air di lokasi banjir 8. Menyiapkan sarana prasarana vital untuk pelayanan public 9. Menyiapkan sarana untuk pemulihan kebersihan lingkungan 	
10.	Klaster Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan sarana belajar mengajar baik secara formal dan non formal 2. Melaksanakan proses belajar mengajar pada saat darurat 3. Memberikan pelayanan bimbingan dan penyuluhan bagi anak anak dewasa. 4. Memberikan penguatan kerohanian bagi korban dan pengungsi. 	
11.	Klaster Peran Serta Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun dan mendata kekurangan sumberdaya di Posko Lapangan 2. Melakukan pendampingan bersama petugas di Posko Lapangan 3. Memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana 	

LAMPIRAN 7

RENCANA OPERASI KESIAPSIAGAAN BANJIR PER KELURAHAN TERDAMPAK DI PROVINSI DKI JAKARTA

LAMPIRAN 7

Rencana Operasi Siaga Darurat Banjir Kelurahan Terdampak di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

NO	LOKASI/KLASTER/KEGIATAN UTAMA	KEBUTUHAN OPERASIONAL	SKPD/UKPD	PERKIRAAN KEBUTUHAN	WAKTU TANGGAP	TITIK KOMPUL SIAGA	KOMANDO/NAMA/TELP
1	Pencarian dan Penyelamatan	1	Sudin PKP	1 tim / RW terdampak	2 jam	Kantor Kelurahan	
		1	Sudin PKP	1 unit / RW terdampak	1 hari	Kantor Kelurahan	
		2	Sudin PKP	3 pcs / RW terdampak	1 hari	Kantor Kelurahan	
		3	Sudin PKP	1 unit / tim	1 hari	Kantor Kelurahan	
		4	Sudin PKP	1 unit / kelurahan	1 hari	Kantor Kelurahan	
		5	Satpol pp Kelurahan	3 pcs / RW terdampak	1 hari	Kantor Kelurahan	
		6	Sudin PKP dan Kelurahan	3 set / RW terdampak	1 hari	Kantor Kelurahan	
		7	Sudin PKP dan Kelurahan	1 tim / kelurahan	1 hari	Kantor Kelurahan	
		8	AGD + Puskesmas Kecamatan	1 tim / kelurahan	1 hari	Kantor Kelurahan	
		9	puskes kecamatan kelurahan	1 unit / kelurahan	1 hari	Kantor Kelurahan	
2	Patroli pengamanan wilayah dan perlindungan kelompok rentan	1	Bimmas/babinsa dan satgas pol pp	1 tim / RW terdampak	1 hari	Kantor Kelurahan	
		2					
2	Pengungsian dan Perlindungan	1	KPBK	4 pcs / RW terdampak	1 hari	KPBK	
		2	Sudin Sosial	1 set / RW terdampak	1 hari	Sudin Sosial	
		3	DPE	1 unit / RW terdampak	1 hari	DPE	
		4	DPE	1 set / RW terdampak	1 hari	DPE	
		1	Sudin Kebersihan	1 unit / kelurahan	1 hari	Sudin Kebersihan	
		2	Sudin Kebersihan	1 set / RW terdampak	1 hari	Sudin Kebersihan	
		3	Lurah	1 unit / RW terdampak	1 hari	Lurah	
		1	Alas tidur				
		2	Tenda dan personil				
		3	Genset dan personil				
3	Kesehatan	1	Sudin Kesehatan	1 pos / kelurahan	1 hari	Sudin Kesehatan	
		2	Sudin Kesehatan	1 tim / kelurahan	1 hari	Sudin Kesehatan	
		1	Sudin Kesehatan	1 tim / kelurahan	1 hari	Sudin Kesehatan	
		1	Sudin Kesehatan	1 tim / kelurahan	1 hari	Sudin Kesehatan	
4	Logistik	1	Sudin Sosial	1 paket / tempat pengungsian	3 jam	Sudin Sosial	
		2	Lurah	1 tim / RW terdampak	1 hari	Lurah	
		3	KPBK	1 tim / kelurahan	1 hari	KPBK	
5	Sarana prasarana	1	Polsek + sudin hub kecamatan	1 tim / RW terdampak	3 jam	Polsek + sudin hub	
		2	Dikdas	1 tim / kelurahan	1 hari	Camat	
6	Pendidikan	1	Sekolah darurat	1 tim / kelurahan	1 hari	Dikdas	
		2					